

ANALISIS DAYA SAING DAERAH DI JAWA TENGAH

**(Studi Kasus: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta,
Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal Tahun 2009-
2011)**



Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ANITA NUR MILLAH

NIM. C2B009019

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

Nama Penyusun : Anita Nur Millah

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009019

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **“ANALISIS DAYA SAING DAERAH DI
JAWA TENGAH” (Studi Kasus: Kota
Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta,
Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota
Tegal Tahun 2009-2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

Semarang, Desember 2013

Dosen Pembimbing,

Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anita Nur Millah

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009019

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **“ANALISIS DAYA SAING DAERAH DI
JAWA TENGAH” (Studi Kasus: Kota
Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta,
Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota
Tegal Tahun 2009-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si (.....)
2. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
3. Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si (.....)

Semarang, Desember 2013
Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anita Nur Millah menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Daya Saing Daerah di Jawa Tengah, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Desember 2013

Yang membuat pernyataan,

(Anita Nur Millah)

NIM : C2B009019

ABSTRACT

Area of the city as a growth center or community center supposed to be more advanced in the region's economy, infrastructure, and also natural and human resources. In fact, the results of the level of competitiveness some of city regions in Central Java tends to be lower when compared to the district. This study aims to determine how the level of competitiveness of city regions in Central Java and the potential of what is contained by each of these areas.

The study used the competitiveness analysis method, which calculates scores and the index during the period 2009-2011. Type of data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in Central Java, PLN Ltd. Company distribution Central Java, and other literature such as books, and economic journals.

The results of the level of competitiveness of city regions in Central Java, among others Semarang get first rank at the level of competitiveness of city regions in Central Java from 2009 to 2011. While Tegal has lowest ranks in 2009 and 2011, and the lowest ranked is Magelang in 2010. Potential Semarang win on almost all indicators of competitiveness. The more winning potential of a region, the higher the level of competitiveness of the city region.

Keywords: competitiveness, the city, the region's economy, infrastructure, natural resources, human resources

ABSTRAKSI

Kota sebagai pusat pertumbuhan ataupun pusat kegiatan masyarakat seharusnya lebih maju di bidang perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Namun pada kenyataannya hasil tingkat daya saing beberapa kota di Jawa Tengah cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat daya saing daerah kota di Jawa Tengah dan potensi apa saja yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis daya saing dengan menghitung scoring dan indeks dengan waktu penelitian tahun 2009-2011. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi.

Hasil tingkat daya saing daerah kota di Jawa Tengah antara lain Kota Semarang menduduki peringkat pertama pada tingkat daya saing daerah kota di Jawa Tengah dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Sedangkan Kota Tegal menduduki peringkat terendah pada tahun 2009 dan 2011, dan Kota Magelang menduduki peringkat terendah pada tahun 2010. Potensi Kota Semarang unggul pada hampir seluruh indikator daya saing. Semakin unggul potensi yang dimiliki suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat daya saing daerah kota tersebut.

Kata kunci : daya saing, kota, perekonomian daerah, infrastruktur, SDA, SDM

KATA PENGANTAR

Syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT pemilik alam semesta atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mempunyai semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Daya Saing Daerah Kota di Jawa Tengah” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan IESP dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga, pikiran, tawa, kritik dan saran yang telah bapak berikan.
3. Bapak Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S. selaku Dosen Wali atas segala arahannya selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Kedua orang tua, Bapak Sutarno, S.H. dan Ibu Nur Is Beti, yang selalu mendoakan, memotivasi, mengarahkan dan membimbing tanpa kenal lelah. Terima kasih atas kesabaran dan limpahan kasih sayangnya.
6. Petugas BPS yang setia membantu ketika penulis kesulitan mencari data di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
7. Aditya Sandi Yudha, orang yang mengajarkan banyak hal positif. Terimakasih untuk dukungan semangatnya.
8. Rifky Adhitya Nugraha, terimakasih untuk limpahan perhatian dan semangatnya.

9. Adikku tercinta Ana Salma Puspita, penyemangat hidup penulis.
10. Sahabat penulis Fellycia Agnisa Saputri, Diana Indah Pertiwi, dan Rebecca Christina. Teman bermain, teman belajar, teman diskusi, teman jalan-jalan, teman curhat, dan teman segalanya. Semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai akhir hayat.
11. Teman-teman kontrakan beserta rombongan, lia permadani, lia triana, tyas, vrili, danish, upil, widi, pipit, dien, wina, icha. Terimakasih untuk segalanya. Semoga kita bisa sukses mencapai cita-cita masa depan bersama.
12. Keluarga besar IESP FEB UNDIP 2009. Terima kasih atas tawa, duka, kerjasama dan kekompakannya selama ini.
13. Teman-teman yang sering direpotin selama mengerjakan skripsi, wibi, furry, vrili, dan arsono. Terimakasih untuk ide dan ilmunya, kalian memang teman yang baik.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, Desember 2013

Penulis

Anita Nur Millah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Konsep Daya Saing Global	14
2.1.2 Model Diamond Porter	16
2.1.3 Model Sembilan Faktor	19
2.1.4 Konsep Daya Saing Daerah	24
2.1.5 Indikator Utama Daya Saing Daerah	25
2.1.6 Indikator Penentu Daya Saing Daerah Kota	27
2.1.7 Definisi dan Konsep Perkembangan Kota	29
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.3 Metode Pengumpulan Data	50
3.4 Metode Analisis	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	55
4.1.1 Kota Semarang	55
4.1.2 Kota Salatiga	56
4.1.3 Kota Surakarta	57
4.1.4 Kota Magelang	58
4.1.5 Kota Pekalongan	59
4.1.6 Kota Tegal	60
4.2 Deskripsi Variabel	61
4.2.1 Perekonomian Daerah	61

4.2.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	61
4.2.1.2	Laju Pertumbuhan PDRB	62
4.2.1.3	PDRB perkapita	63
4.2.1.4	Tabungan	64
4.2.1.5	Laju Pertumbuhan Tabungan	65
4.2.1.6	Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri ..	66
4.2.1.7	Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Jasa	67
4.2.1.8	Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian	67
4.2.1.9	Pendapatan Asli Daerah	68
4.2.1.10	Realisasi Pajak Daerah	69
4.2.2	Infrastruktur dan Sumber Dya Alam	70
4.2.2.1	Ketersediaan Sumber Daya Lahan	70
4.2.2.2	Hasil Sumber Daya Air	71
4.2.2.3	Kualitas Jalan Raya	72
4.2.2.4	Jumlah Pelanggan Listrik	73
4.2.2.5	Persentase Rumah Tangga Terhadap Kepemilikan Pesawat Telepon	74
4.2.3	Sumber Daya Manusia	74
4.2.3.1	Angka Ketergantungan	75
4.2.3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76
4.2.3.3	Persentase Penduduk Usia Produktif Terhadap Total Penduduk	77
4.2.3.4	Rasio Siswa Terhadap Sekolah	78
4.2.3.5	Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa	79
4.3	Analisis Data	80
4.3.1	Tingkat Daya Saing Daerah di Jawa Tengah	80
4.3.1.1	Skoring Daya Saing	80
4.3.1.1.1	Skoring Daya Saing Menurut Indikator Perekonomian Daerah	80
4.3.1.1.2	Skoring Daya Saing Menurut Indikator Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	84
4.3.1.1.3	Skoring Daya Saing Menurut Indikator Sumber Daya Manusia	87
4.3.1.2	Tingkat Daya Saing Daerah Tahun 2009-2011	90
4.3.2	Potensi Daya Saing Daerah di Jawa Tengah	92
4.3.2.1	Potensi Daya Saing Daerah Kota Semarang	92
4.3.2.2	Potensi Daya Saing Daerah Kota Surakarta	93
4.3.2.3	Potensi Daya Saing Daerah Kota Pekalongan	94
4.3.2.4	Potensi Daya Saing Daerah Kota Magelang	95
4.3.2.5	Potensi Daya Saing Daerah Kota Salatiga	96
4.3.2.6	Potensi Daya Saing Daerah Kota Tegal	97
BAB V PENUTUP		99
5.1	Kesimpulan dan Saran	99
5.1.1	Kesimpulan	99
5.1.2	Saran	100

DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2011.....	4
Tabel 1.2	Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	6
Tabel 1.3	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010	8
Tabel 1.4	Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kondisi Jalan di Jawa Tengah Tahun 2011	9
Tabel 2.1	Jumlah dan Deskripsi Indikator Daya Saing Menurut Variabel Utama.....	29
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	62
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	63
Tabel 4.3	PDRB Perkapita Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	64
Tabel 4.4	Posisi Tabungan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	64
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan Tabungan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	65
Tabel 4.6	Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	66
Tabel 4.7	Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Jasa Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	67
Tabel 4.8	Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	67
Tabel 4.9	Pendapatan Asli Daerah Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.	69
Tabel4.10	Realisasi Pajak Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	69
Tabel4.11	Ketersediaan Sumber Daya Lahan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	70
Tabel4.12	Produksi Dan Nilai Perikanan Kolam Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	71
Tabel 4.13	Kualitas Jalan Raya Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	72
Tabel 4.14	Jumlah Pelanggan Listrik Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	73
Tabel 4.15	Persentase Rumah Tangga Terhadap Kepemilikan Pesawat Telepon Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	74
Tabel 4.16	Angka Ketergantungan Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	75
Tabel 4.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota di Jawa Tengah Tahun 2009- 2011	76
Tabel 4.18	Persentase Penduduk Usia Produktif Terhadap Total Penduduk Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	77
Tabel 4.19	Rasio Siswa Terhadap Sekolah Kota di Jawa Tengah	

	Tahun 2009-2011.....	78
Tabel 4.20	Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	79
Tabel 4.21	Skoring Daya Saing Berdasarkan Perekonomian Daerah Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	81
Tabel 4.22	Pemeringkatan Daerah Menurut Indikator Perekonomian Daerah Tahun 2009-2011.....	83
Tabel 4.23	Skoring Daya Saing Berdasarkan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Daerah di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	84
Tabel 4.24	Pemeringkatan Daerah Menurut Indikator Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2009-2011	87
Tabel 4.25	Skoring Daya Saing Berdasarkan Sumber Daya Manusia Daerah di Jawa Tengah Tahun 2009-2011.....	88
Tabel 4.26	Pemeringkatan Daerah Menurut Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2009-2011	90
Tabel 4.27	Indeks Daya Saing Daerah di Jawa Tengah tahun 2009-2011.....	91
Tabel 4.28	Pemeringkatan Daya Saing Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2010	3
Gambar 1.2 Skema Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Peta Daerah Kota di Jawa Tengah	61

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel <i>Advantage dan Disadvantage</i> Daerah Kota.....	103
Data Mentah Perekonomian Daerah	109
Data Mentah Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	110
Data Sumber Daya Manusia	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan regional merupakan bagian yang penting dalam pembangunan nasional. Karena itu diharapkan bahwa hasil pembangunan dapat terdistribusi dan teralokasi ke tingkat regional. Untuk mencapai keseimbangan regional terutama dalam perkembangan ekonominya maka diperlukan beberapa kebijaksanaan dan program pembangunan daerah yang mengacu pada kebijaksanaan regionalisasi atau perwilayahan.

Dalam masa otonomi daerah saat ini setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi sebagai upaya yang tepat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, sehingga meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antar daerah yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, faktor geografis seperti perbedaan kesuburan tanah maupun kondisi daerah, hal tersebut tidak akan mengakibatkan perbedaan dalam kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat diperoleh dari pengembangan wilayah yang dilakukan dengan cara pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini sudah menjadi tujuan dalam pembangunan dan pengembangan kota/kabupaten di Indonesia.

Salah satu alat ukur konsep kota yang berkelanjutan adalah tingkat daya saing antar wilayah. Semakin tinggi daya saing suatu kota, maka semakin tinggi

pula kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia.

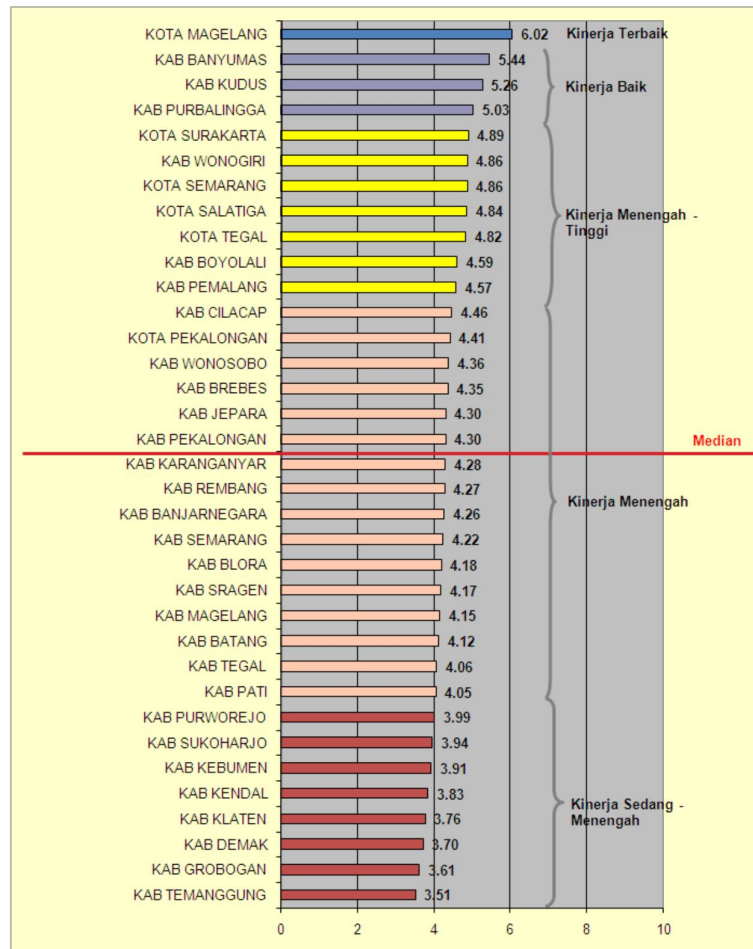
Daerah kota mempunyai peran strategis dalam pembangunan wilayah yang mempunyai hubungan ke belakang dengan kota-kota kecil dan hinterlandnya dan juga hubungan ke depan dengan kota-kota besar lainnya. Meskipun sumber daya alam yang tersedia di perkotaan terbatas, namun kota sebagai pusat produksi barang dan jasa mampu memberikan layanan yang kompetitif. Kota juga sebagai pasar yang potensial untuk melayani kebutuhan penduduknya dengan daya beli yang cukup tinggi, disamping kemampuannya mendistribusikan barang dan jasa ke wilayah lain (Santoso, 2009).

Jawa Tengah sebagai provinsi yang memiliki 29 kabupaten dan 6 kota memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota tersebut untuk mengelola daerahnya masing-masing serta terus meningkatkan pembangunan daerah agar nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah tersebut.

Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal merupakan daerah perkotaan yang seharusnya mempunyai daya saing tinggi bila dibandingkan dengan daerah kabupaten. Namun berdasarkan survey daya saing yang dilakukan oleh Budi Santoso Foundation, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia Semarang dan *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit* (GTZ) tahun 2010 dengan 6 indikator yaitu iklim bisnis, kinerja

pemerintah, infrastruktur, kinerja ekonomi, kinerja investasi, dan dinamika bisnis, kota-kota di Jawa Tengah tidak seluruhnya menduduki peringkat unggul. Bahkan daerah kabupaten seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Purbalingga memperoleh predikat kinerja baik, mengalahkan Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.

Gambar 1.1
Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2010



Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah

Perekonomian daerah sebagai salah satu variabel daya saing perlu ditekankan khusus demi pembangunan daerah yang terus berkelanjutan. Perekonomian daerah juga akan menentukan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat ukur perekonomian daerah terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. Tabel tersebut memperlihatkan pendapatan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2007-2011 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Cilacap	11.140.846	11.689.093	12.302.860	12.998.129	13.749.105
2	Kab. Banyumas	3.958.646	4.171.469	4.400.542	4.654.634	4.927.351
3	Kab. Purbalingga	2.143.746	2.257.393	2.390.245	2.525.873	2.679.134
4	Kab. Banjarnegara	2.495.786	2.619.990	2.753.936	2.888.524	3.030.542
5	Kab. Kebumen	2.572.063	2.721.254	2.828.395	2.945.829	3.089.588
6	Kab. Purworejo	2.591.535	2.737.087	2.872.724	3.016.598	3.168.113
7	Kab. Wonosobo	1.679.150	1.741.148	1.811.093	1.888.808	1.974.114
8	Kab. Magelang	3.582.648	3.761.389	3.938.765	4.116.390	4.292.354
9	Kab. Boyolali	3.748.102	3.899.373	4.100.520	4.248.048	4.472.217
10	Kab. Klaten	4.394.688	4.567.201	4.761.019	4.843.247	4.938.051
11	Kab. Sukoharjo	4.330.993	4.540.752	4.756.902	4.978.263	5.206.688
12	Kab. Wonogiri	2.657.069	2.770.436	2.901.577	3.071.964	3.134.182
13	Kab. Karanganyar	4.654.054	4.900.690	5.172.268	5.452.435	5.752.065
14	Kab. Sragen	2.582.492	2.729.450	2.893.427	3.069.751	3.270.053
15	Kab. Grobogan	2.799.701	2.948.794	3.097.093	3.253.399	3.370.344
16	Kab. Blora	1.811.864	1.913.763	2.010.909	2.115.370	2.170.195
17	Kab. Rembang	1.999.951	2.093.413	2.186.736	2.283.966	2.384.459
18	Kab. Pati	3.966.062	4.162.082	4.357.144	4.579.853	4.828.723
19	Kab. Kudus	11.243.359	11.683.820	12.144.952	12.651.059	13.183.607
20	Kab. Jepara	3.722.678	3.889.989	4.085.438	4.270.257	4.504.552
21	Kab. Demak	2.677.367	2.787.524	2.901.152	3.020.821	3.156.126
22	Kab. Semarang	4.871.444	5.079.004	5.300.723	5.560.552	5.877.191
23	Kab. Temanggung	2.143.221	2.219.156	2.309.842	2.409.386	2.521.439
24	Kab. Kendal	4.625.456	4.822.465	5.090.287	5.394.079	5.717.410
25	Kab. Batang	2.092.974	2.169.855	2.250.617	2.362.482	2.486.766
26	Kab. Pekalongan	2.834.685	2.970.215	3.098.071	3.230.351	3.384.388
27	Kab. Pemasang	2.993.297	3.142.809	3.293.056	3.455.713	3.622.636
28	Kab. Tegal	3.120.396	3.286.263	3.460.132	3.627.198	3.801.779
29	Kab. Brebes	4.769.145	4.998.528	5.247.897	5.507.403	5.780.878
30	Kota Magelang	946.098	993.835	1.044.650	1.108.604	1.169.343
31	Kota Surakarta	4.304.287	4.549.343	4.817.878	5.103.886	5.411.912
32	Kota Salatiga	792.680	832.155	869.453	913.020	963.457
33	Kota Semarang	18.142.640	19.156.814	20.180.578	21.365.818	22.736.136
34	Kota Pekalongan	1.820.001	1.887.854	1.978.082	2.087.114	2.200.828
35	Kota Tegal	1.109.439	1.166.588	1.225.102	1.281.528	1.340.228
36	Jawa Tengah	159.110.254	168.034.483	176.673.457	186.995.481	198.226.349

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memperoleh pendapatan paling unggul dimana pendapatannya pada tahun 2007 sebesar 18.142.640 juta rupiah, tahun 2008 sebesar 19.156.814 juta rupiah, tahun 2009 sebesar 20.180.578 juta rupiah, tahun 2010 sebesar 21.365.818 juta rupiah dan tahun 2011 sebesar 22.736.136 juta rupiah. Jumlah tersebut merupakan pendapatan tertinggi bila dibandingkan dengan daerah kota maupun daerah kabupaten di Jawa Tengah. Pendapatan daerah kota terbesar kedua adalah Kota Surakarta dimana pada tahun 2007 PDRB nya sebesar 4.304.287 juta rupiah, dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 menjadi 5.411.912 juta rupiah. Sedangkan pendapatan terendah daerah kota adalah Kota Salatiga dimana PDRB nya pada tahun 2007 sebesar 792.680 juta rupiah, tahun 2008 sebesar 832.155 juta rupiah, tahun 2009 sebesar 869.453 juta rupiah, tahun 2010 sebesar 913.020 juta rupiah, dan tahun 2011 sebesar 963.457 juta rupiah. Nilai rata-rata PDRB daerah kota di Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan daerah kabupaten.

Selain perekonomian daerah, angkatan kerja juga merupakan salah satu indikator sumber daya manusia yang ikut andil dalam peningkatan pembangunan suatu daerah. Tabel 1.2 di bawah ini merupakan tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009-2011. Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja

daerah kota di Jawa Tengah jumlahnya cenderung sedikit bila dibandingkan dengan daerah kabupaten.

Tabel 1.2
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Kab. Cilacap	689.485	688.049	797.518
2	Kab. Banyumas	680.460	733.609	761.034
3	Kab. Purbalingga	401.829	418.945	410.082
4	Kab. Banjarnegara	430.667	452.617	429.193
5	Kab. Kebumen	557.099	537.808	558.785
6	Kab. Purworejo	341.263	341.033	345.383
7	Kab. Wonosobo	380.776	381.326	369.940
8	Kab. Magelang	600.436	629.239	590.807
9	Kab. Boyolali	512.634	506.987	462.374
10	Kab. Klaten	577.901	548.672	564.784
11	Kab. Sukoharjo	414.058	400.526	411.536
12	Kab. Wonogiri	550.876	495.295	484.858
13	Kab. Karanganyar	417.838	427.435	407.869
14	Kab. Sragen	466.332	463.749	433.620
15	Kab. Grobogan	720.700	688.296	649.149
16	Kab. Blora	457.502	441.334	424.989
17	Kab. Rembang	302.260	304.638	300.096
18	Kab. Pati	590.171	581.998	603.103
19	Kab. Kudus	406.909	394.361	383.399
20	Kab. Jepara	533.446	536.754	527.480
21	Kab. Demak	494.917	492.570	505.834
22	Kab. Semarang	470.675	502.705	465.735
23	Kab. Temanggung	372.741	396.063	360.635
24	Kab. Kendal	489.173	447.120	446.514
25	Kab. Batang	322.932	353.214	347.725
26	Kab. Pekalongan	412.482	401.931	393.783
27	Kab. Pemalang	576.795	515.127	591.728
28	Kab. Tegal	590.539	545.618	654.335
29	Kab. Brebes	760.430	812.098	824.449
30	Kota Magelang	56.107	53.719	58.919
31	Kota Surakarta	246.768	235.998	249.368
32	Kota Salatiga	78.668	73.329	83.879
33	Kota Semarang	703.620	724.687	770.886
34	Kota Pekalongan	133.326	134.984	131.158
35	Kota Tegal	102.585	107.613	115.187

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Angkatan kerja daerah kota terbesar diperoleh Kota Semarang dengan jumlah 703.620 jiwa pada tahun 2009, 724.687 jiwa pada tahun 2010 dan 770.886 jiwa pada tahun 2011. Disusul oleh Kota Surakarta dengan jumlah angkatan kerja 246.768 jiwa pada tahun 2009, 235.998 pada tahun 2010, dan 249.368 jiwa pada

tahun 2011. Kota Pekalongan dengan jumlah angkatan kerja 133.326 jiwa pada tahun 2009, 134.984 jiwa pada tahun 2010, dan 131.158 jiwa pada tahun 2011. Kemudian disusul oleh Kota Tegal dengan jumlah angkatan kerja sebesar 102.585 jiwa pada tahun 2009, 107.613 jiwa pada tahun 2010, dan 115.187 jiwa pada tahun 2011. Sedangkan angkatan kerja di Kota Salatiga sebesar 78.668 jiwa pada tahun 2009, 73.329 pada tahun 2010, dan 83.879 jiwa pada tahun 2011. Dan untuk angkatan kerja daerah kota paling rendah adalah Kota Magelang yaitu 56.107 jiwa pada tahun 2009, 53.719 jiwa pada tahun 2010, dan 58.919 jiwa pada tahun 2011.

Angkatan kerja sebagai salah satu indikator sumberdaya manusia memang cukup penting dalam pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Namun, sumberdaya alam dan infrastruktur juga perlu dilihat dimana suatu kegiatan tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya kualitas sumberdaya alam dan infrastruktur yang baik. Ketersediaan sumber daya lahan sebagai salah satu indikator infrastruktur dan sumber daya alam (SDA) daerah kota di Jawa Tengah jumlahnya sangat sedikit, baik luas lahan sawah maupun bukan lahan sawah. Total lahan Kota Magelang hanya sebesar 1.812 hektar, Kota Surakarta sebesar 4.403 hektar, Kota Salatiga sebesar 5.296 hektar, Kota Semarang sebesar 37.367 hektar, Kota Pekalongan sebesar 4.496 hektar dan Kota Tegal sebesar 3.449 hektar. Jumlah tersebut sangat jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah kabupaten. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini. Tabel tersebut memperlihatkan luas penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 (ha).

Tabel 1.3
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 (ha)

No	Kabupaten/Kota	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Jumlah Total
1	Kab. Cilacap	63.318	150.533	213.851
2	Kab. Banyumas	32.367	100.392	132.759
3	Kab. Purbalingga	20.737	57.028	77.765
4	Kab. Banjarnegara	14.663	92.311	106.974
5	Kab. Kebumen	39.768	88.506	128.274
6	Kab. Purworejo	30.060	73.422	103.482
7	Kab. Wonosobo	17.174	81.294	98.468
8	Kab. Magelang	37.220	71.353	108.573
9	Kab. Boyolali	22.920	78.587	101.507
10	Kab. Klaten	33.398	32.158	65.556
11	Kab. Sukoharjo	21.256	25.410	46.666
12	Kab. Wonogiri	32.231	150.006	182.237
13	Kab. Karanganyar	22.133	55.087	77.220
14	Kab. Sragen	39.763	54.886	94.649
15	Kab. Grobogan	64.790	132.795	197.585
16	Kab. Blora	46.570	132.87	179.440
17	Kab. Rembang	29.172	72.238	101.410
18	Kab. Pati	59.329	89.791	149.120
19	Kab. Kudus	20.691	21.826	42.517
20	Kab. Jepara	26.576	73.840	100.416
21	Kab. Demak	50.893	38.850	89.743
22	Kab. Semarang	24.410	70.276	94.686
23	Kab. Temanggung	20.619	66.404	87.023
24	Kab. Kendal	26.218	74.009	100.227
25	Kab. Batang	22.480	56.415	78.895
26	Kab. Pekalongan	24.950	58.663	83.613
27	Kab. Pemasang	37.632	63.558	101.190
28	Kab. Tegal	40.287	47.683	87.970
29	Kab. Brebes	62.700	103.073	165.773
30	Kota Magelang	211	1.601	1.812
31	Kota Surakarta	103	4.300	4.403
32	Kota Salatiga	765	4.531	5.296
33	Kota Semarang	3.965	33.402	37.367
34	Kota Pekalongan	1.260	3.236	4.496
35	Kota Tegal	895	2.554	3.449

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, BPS 2012

Selain ketersediaan sumber daya lahan, kualitas jalan raya juga sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Kualitas jalan raya daerah kota di Jawa Tengah rata-rata sudah cukup bagus. Kondisi jalan baik Kota Semarang terlihat paling menonjol dibandingkan dengan daerah lain. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal dimana kota tersebut merupakan kota dengan jalur utama Pantura Jawa Tengah yang seharusnya jalan tersebut

harus berkualitas agar transportasi kendaraan berat maupun non berat yang melewati jalur tersebut dapat berjalan dengan lancar. Data kualitas jalan raya dapat diketahui pada Tabel 1.4 di bawah ini. Tabel tersebut memperlihatkan panjang jalan kabupaten/kota menurut kondisi jalan di Jawa Tengah tahun 2011.

Tabel 1.4
Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kondisi Jalan di Jawa Tengah
Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak	
1	Kab. Cilacap	546,37	196,88	196,26	241,67	1.181,17
2	Kab. Banyumas	273,84	248,64	156,50	125,80	804,78
3	Kab. Purbalingga	306,94	217,57	185,68	-	710,19
4	Kab. Banjarnegara	455,90	167,92	113,35	151,24	888,41
5	Kab. Kebumen	418,59	96,11	83,47	17,03	615,20
6	Kab. Purworejo	280,92	162,35	196,24	111,88	751,39
7	Kab. Wonosobo	528,57	109,66	77,72	94,15	810,10
8	Kab. Magelang	435,29	142,94	41,18	21,70	641,11
9	Kab. Boyolali	283,29	100,35	59,29	108,90	551,83
10	Kab. Klaten	565,68	65,91	91,84	53,57	777,00
11	Kab. Sukoharjo	418,87	92,01	75,42	97,42	683,72
12	Kab. Wonogiri	327,25	289,72	391,75	2,90	1.011,62
13	Kab. Karanganyar	386,61	228,20	203,08	53,43	871,32
14	Kab. Sragen	658,20	198,33	138,60	102,00	1.097,13
15	Kab. Grobogan	241,33	78,39	230,40	332,98	883,10
16	Kab. Blora	158,25	234,85	214,66	189,93	797,69
17	Kab. Rembang	321,74	161,38	83,15	76,48	642,75
18	Kab. Pati	355,88	169,10	80,81	348,33	954,12
19	Kab. Kudus	167,72	155,29	149,08	149,08	621,18
20	Kab. Jepara	86,15	313,77	330,27	59,52	789,70
21	Kab. Demak	253,16	60,60	94,14	18,61	426,51
22	Kab. Semarang	262,82	293,45	110,04	67,31	733,62
23	Kab. Temanggung	447,85	67,88	89,32	-	605,05
24	Kab. Kendal	380,09	153,25	137,66	100,00	770,99
25	Kab. Batang	274,22	174,02	42,09	89,20	579,53
26	Kab. Pekalongan	318,77	130,57	85,29	23,45	558,08
27	Kab. Pemalang	251,10	143,66	112,23	144,98	651,97
28	Kab. Tegal	311,94	235,53	151,88	64,30	763,65
29	Kab. Brebes	494,67	127,67	108,12	183,01	913,47
30	Kota Magelang	43,51	28,36	6,09	-	77,96
31	Kota Surakarta	405,69	224,04	43,08	3,75	676,56
32	Kota Salatiga	343,80	165,07	89,15	56,20	654,21
33	Kota Semarang	1.160,00	905,00	626,00	-	2.691,00
34	Kota Pekalongan	85,37	24,66	13,26	8,04	131,33
35	Kota Tegal	150,25	31,89	30,42	3,31	215,87

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, BPS 2012

Kota sebagai pusat pertumbuhan ataupun pusat kegiatan masyarakat seharusnya lebih maju di bidang perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam serta sumber daya manusia bila dibandingkan dengan kabupaten. Namun berdasarkan data-data di atas sebagai salah satu indikator daya saing daerah untuk menunjukkan peringkat daya saing kota di Jawa Tengah, hasilnya cenderung sangat rendah.

Tingkat daya saing daerah di Jawa Tengah mempunyai kemampuan daya saing dimana masing-masing kota memiliki karakteristik perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Masing-masing kota berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerahnya secara maksimal agar mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemikiran tersebut, penyusunan skripsi ini berjudul **Analisis Daya Saing Daerah di Jawa Tengah**.

1.2 Rumusan Masalah

Kota-kota dengan status sebagai daerah otonom mempunyai tuntutan yang lebih besar dalam membangun daerahnya. Agar kota dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan maka kota harus mampu bersaing dalam penyediaan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kota atau daerah lainnya. Kota-kota yang tidak berdaya saing lambat laun akan mengalami penurunan pertumbuhan daerahnya (Santoso, 2009).

Variabel daya saing seperti perekonomian daerah, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam, serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia kota seharusnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten.

Berdasarkan survey daya saing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 terlihat bahwa kota-kota di Jawa Tengah tidak seluruhnya menduduki peringkat atas. Peringkat pertama diduduki Kota Magelang dengan predikat kinerja terbaik, namun daerah kabupaten seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Purbalingga memperoleh predikat kinerja baik dimana posisinya lebih unggul di atas Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat daya saing daerah di Jawa Tengah?
2. Bagaimana potensi daya saing masing-masing kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik berat pada latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat daya saing daerah di Jawa Tengah.
2. Menganalisis potensi daya saing masing-masing kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan kajian tentang penelitian di atas diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai potensi atau keunggulan dari masing-masing kota di Jawa Tengah dan mengetahui peringkat daya saing daerah kota di Jawa Tengah.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keunggulan atau potensi daerah agar daerah tersebut berdaya saing tinggi.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sedangkan sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dan materi yang dibahas pada setiap bab yang ada, jadi tidak sama dengan daftar isi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu

penulisan. Pada bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dimulai dari definisi operasional dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data sampai dengan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil, analisis serta pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, dan simpulan harus sesuai dengan permasalahan, tujuan dan hipotesis yang diajukan dalam bab-bab selanjutnya. Saran merupakan anjuran disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Daya Saing Global

Michael Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank Dunia menyatakan hal yang relatif sama dimana “daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit yang dicapai oleh perusahaan”. Akan tetapi baik Bank Dunia, Porter, serta literatur-literatur terkini mengenai daya saing nasional memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berfokus hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha (*business environment*) yang jelas-jelas di luar kendali suatu perusahaan. Aspek-aspek tersebut dapat bersifat *firm-specific*, *region-specific*, dan bahkan *country-specific*.

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan “*Global Competitiveness Report*” mendefinisikan daya saing nasional adalah kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-

karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut (Abdullah, 2002).

Lembaga lain yang dikenal luas dalam literatur daya saing nasional adalah *Institute of Management Development (IMD)*, dalam buku “*Daya Saing Daerah*” Abdullah (2002) mendefinisikan bahwa daya saing nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu model ekonomi dan sosial. Dengan perkataan yang lebih sederhana, daya saing nasional adalah suatu konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya.

Menurut Cho (2003), definisi daya saing yang paling populer pada tingkat nasional juga dapat ditemukan dalam Laporan Komisi Kemampuan Bersaing Presiden yang ditulis untuk pemerintahan Reagan pada tahun 1984 yaitu sebagai berikut:

“Kemampuan bersaing sebuah negara adalah derajat di mana negara itu dapat, di bawah keadaan pasar yang bebas dan adil, menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi uji pasar internasional sementara secara simultan melakukan perluasan pendapatan riil dari para warga negaranya. Kemampuan bersaing pada tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas superior”.

Terdapat suatu hal penting lainnya dalam mendefinisikan kemampuan bersaing sebuah negara. Hal ini hanya berarti di antara negara-negara yang diberi keunggulan komparatif yang sama dan bersaing dalam industri yang sama.

2.1.2 Model Diamond Porter

Porter (1990) berpendapat bahwa negara cenderung berhasil dalam industri atau segmen industri dimana “diamond” nasionalnya mendukung. Diamond memiliki empat komponen yang saling terkait: (1) kondisi faktor, (2) kondisi permintaan, (3) industri terkait dan pendukung, dan (4) strategi perusahaan, struktur, dan persaingan, dan dua parameter eksogen yaitu pemerintah dan peluang. Model ini secara akurat menyatukan variabel-variabel penting yang menentukan kemampuan bersaing sebuah negara menjadi satu model. Empat komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi Faktor

Porter memisahkan antara faktor dasar dengan faktor lanjut. Faktor dasar mencakup sumber daya alam, iklim, lokasi, tenaga kerja tidak terampil dan semi terampil, dan modal utang. Faktor lanjut mencakup infrastruktur komunikasi modern dan personalia yang berpendidikan tinggi seperti insinyur dan ilmuwan. Porter (1990) berpendapat bahwa faktor lanjut saat ini merupakan faktor yang paling signifikan untuk keunggulan kompetitif.

2. Kondisi Permintaan

Tingkat pertumbuhan permintaan negara asal dapat lebih penting bagi keunggulan kompetitif daripada ukuran absolutnya. Pertumbuhan domestik yang cepat mengarahkan perusahaan dari sebuah negara untuk

menggunakan teknologi baru yang lebih cepat, dengan mengurangi rasa ketakutan bahwa teknologi seperti ini akan menjadikan investasi yang telah ada menjadi sia-sia, dan membangun fasilitas yang besar dan efisien dengan kepercayaan bahwa fasilitas tersebut akan digunakan (Porter, 1990). Sebagai tambahan, perusahaan dari sebuah negara memperoleh keunggulan kompetitif jika para pembeli domestiknya berpengalaman dan memiliki permintaan dalam artian barang dan jasa (Porter, 1990). Dapat dihipotesiskan bahwa suatu tingkat pendidikan konsumen yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan.

3. Industri Terkait dan Pendukung

Industri terkait dan pendukung adalah industri dimana perusahaan melakukan koordinasi atau berbagi aktivitas dalam rantai nilai dan industri yang melibatkan produk yang melengkapi perusahaan dari suatu negara tertentu. Industri ini mungkin memiliki ikatan ke belakang dan ke depan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan dalam suatu sektor tertentu. Karena kita sedang menguji kemampuan bersaing dari industri manufaktur pada umumnya di Korea dan Singapura, meskipun demikian, maka informasi mengenai infrastruktur umum seperti angkutan dan komunikasi penting sifatnya. Transportasi diukur dengan jalan yang beraspal (km/juta orang) dan komunikasi diukur dengan jaringan telepon (per 100 orang). Infrastruktur untuk bisnis internasional sifatnya sangat penting karena infrastruktur untuk angkutan internasional diukur dengan lingkup dimana infrastruktur angkutan udara internasional memenuhi persyaratan bisnis.

Infrastruktur untuk komunikasi internasional diukur dengan lalu lintas teleks internasional dalam artian lalu lintas dalam menit per kapita.

4. Strategi Perusahaan, Struktur, dan Persaingan

Penentu akhir dari kemampuan bersaing sebuah negara mencerminkan konteks di mana perusahaan diciptakan, diorganisir, dan dikelola. Keunggulan nasional dapat dihasilkan dari suatu kecocokan antara variabel-variabel ini. Meskipun demikian, Porter (1990) menemukan bahwa tidak ada suatu sistem manajerial yang secara universal sesuai. Sebaliknya, ia mengungkapkan preferensi yang kuat dalam dukungan persaingan domestik yang ketat untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam suatu industri. Porter (1990) berpendapat bahwa persaingan domestik superior terhadap persaingan dengan para pesaing asing. Pendapat ini mungkin benar adanya dalam perekonomian besar seperti Amerika Serikat, tetapi tidak dalam perekonomian kecil seperti Kanada, Korea dan Singapura. Perusahaan yang berhasil di Korea dan Singapura lebih peduli tentang persaingan internasional daripada persaingan domestik. Persaingan internasional dapat diukur dengan keterbukaan pada produk asing yang merupakan lingkup dimana proteksionisme nasional tidak mencegah produk yang kompetitif yang diimpor.

Cho (1994) berpendapat bahwa model asli Porter terbatas dalam aplikasinya di negara yang sedang berkembang seperti Korea. Ia menekankan kelompok faktor manusia yang berbeda dan jenis faktor fisik yang berbeda dalam

menjelaskan daya saing sebuah negara. Faktor manusia mencakup pekerja, politisi/birokrat, wirausahawan, dan kaum profesional. Faktor fisik mencakup sumber daya yang merupakan anugerah, permintaan domestik, industri terkait dan pendukung, dan lingkungan bisnis lainnya. Sebuah faktor eksternal, peluang, ditambahkan pada delapan faktor internal ini untuk membuat paradigma baru, model sembilan faktor.

Perbedaan antara model sembilan faktor dengan model diamond Porter adalah dalam pembagian faktor, dan dalam penambahan faktor baru. Model diamond mencakup sumber daya alam maupun tenaga kerja dalam kondisi faktor, tetapi model sembilan faktor menempatkan sumber daya alam dalam sumber daya yang merupakan anugerah, sementara tenaga kerja tercakup di dalam golongan pekerja. Faktor manusia memobilisasikan faktor fisik, dan manusia menggabungkan dan menyusun faktor-faktor fisik dengan maksud memperoleh daya saing internasional.

2.1.3 Model Sembilan Faktor

Menurut Cho (2003) apabila tujuannya untuk menilai daya saing internasional Korea, dua pertimbangan utama harus diperhatikan. Pemerintah dan bisnis harus memperkenalkan modal dan teknologi dari negara asing atau menciptakan sumber daya dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dari tahap awalnya. Mesin kunci dari pertumbuhan perekonomian Korea adalah kelompok orang yang berlimpah dan beragam dalam hal tingkat pendidikan, motivasi, dan dedikasi kerja yang pada umumnya tinggi. Populasi Korea dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: pekerja; politisi dan birokrat

yang merumuskan dan menerapkan rencana perekonomian; para wirausahawan yang membuat keputusan investasi terlepas dari risiko tinggi; dan para manajer profesional yang berwenang dalam bidang operasi dan para insinyur yang menerapkan teknologi baru. Untuk menerima dengan baik kontribusinya pada pembangunan Korea, suatu model sembilan faktor diperlukan. Terdapat empat penentu fisik dari daya saing internasional, yaitu sumber daya yang dianugerahkan, lingkungan bisnis, industri terkait dan pendukung permintaan domestik; terdapat juga empat faktor manusia yakni pekerja, politisi dan birokrat, para wirausahawan dan manajer serta insinyur yang profesional (Cho, 2003).

1. Faktor Fisik

a. Sumber daya yang dianugerahkan

Sumber daya yang dianugerahkan di sini dapat dibagi menjadi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lingkungan. Sumber daya mineral bisa habis, dan sumber daya energi seperti batu bara, minyak, dan gas alam dapat dipisahkan dari sumber daya non energi seperti bijih besi, emas, dan perak. Persediaan pertanian, hutan, ikan dapat diperbarui dan faktor lingkungan terdiri dari lahan, cuaca, air, dan keunggulan alam lainnya. Semua sumber daya ini dapat membentuk *input* menjadi aktivitas perekonomian, dan dapat bertambah pada daya saing internasional sebuah negara.

b. Lingkungan bisnis

Lingkungan bisnis seharusnya dipandang pada tingkat negara, industri, dan perusahaan. Pada tingkat nasional, terdapat komponen yang dapat

dilihat dan yang tidak dapat dilihat: yang pertama mencakup jalan, pelabuhan, telekomunikasi dan bentuk infrastruktur lain; yang kedua berkenaan dengan penerimaan orang akan nilai-nilai kompetitif dan mekanisme pasar dan komitmen produsen, pedagang, konsumen dan partisipasi lain di dalam perekonomian pada keabsahan dan kewajiban kesepakatan komersial dan kredit komersial. Pada suatu tingkat industri, lingkungan bisnis ditentukan oleh jumlah dan ukuran pesaing, jenis dan tingginya hambatan masuk, derajat differensiasi produk, dan faktor lain yang membentuk sifat persaingan dan aktivitas perekonomian. Pada suatu tingkat perusahaan, strategi dan organisasi bisnis, serta sikap dan perilaku, individu dan kelompok di dalam perusahaan merupakan pertimbangan utama.

c. Industri terkait dan pendukung

Industri terkait dapat dibagi menjadi industri terkait secara vertikal dan industri terkait secara horisontal. Jika yang vertikal mencakup pengaruh tahap hulu dan hilir dari produksi, maka yang horisontal berkenaan dengan industri yang menggunakan teknologi, bahan baku, jaringan kerja distribusi, atau aktivitas pemasaran yang sama. Industri pendukung mencakup sektor keuangan, asuransi, informasi, angkutan, dan jasa lainnya.

d. Permintaan domestik

Permintaan domestik mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Ukuran pasar domestik menentukan skala ekonomi minimal untuk

perusahaan pribumi, sebagaimana juga stabilitas permintaan. Perekonomian negara asal bertindak sebagai pasar uji untuk produk yang dapat dikirimkan ke luar negeri, dan risiko perdagangannya berkurang. Manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dari dimensi kualitatif. Pengharapan konsumen dapat merangsang daya saing, dan dalam sebuah negara di mana konsumen memiliki standar yang berpengalaman dan ketat dalam hal kualitas produk sebagai tambahan pada derajat konsumerisme yang tinggi, bisnisnya dapat menambah keunggulan internasional dalam rangkaian kondisi negara asal yang memiliki permintaan dan memuaskan.

2. Faktor Manusia

a. Pekerja

Ukuran nilai pekerja yang paling mudah teridentifikasi adalah tingkat upah, meskipun demikian ini hanyalah salah satu dari banyak atribut yang secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi produktifitas tenaga kerja. Atribut lainnya adalah tingkat pendidikan, suatu perasaan memiliki suatu organisasi, penerimaan kewenangan, suatu etos kerja, dan ukuran kumpulan tenaga kerja.

b. Politisi dan birokrat

Negara yang diperintah oleh para politisi yang memiliki komitmen pada pertumbuhan dan keberhasilan dapat membimbing dalam penciptaan daya saing internasional. Pada umumnya, suatu birokrasi yang efisien dan tidak korupsi dapat menuntun penerapan kebijakan

negara, dan dapat membuat kontribusi yang berarti pada daya saing internasional.

c. Para wirausahawan

Dengan adanya spekulasi para wirausahawan pada bisnis baru terlepas dari derajat risiko yang tinggi, para wirausahawan tersebut terpisah dari pengusaha biasa. Mereka vital bagi setiap negara dalam suatu tahap awal dalam pembangunan perekonomian. Dari waktu ke waktu, daya saing sebuah negara diperkuat dengan usaha mereka untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan *return*.

d. Para manajer dan para insinyur yang profesional

Pada saat persaingan internasional membutuhkan pemotongan harga yang berani dan pencarian untuk meningkatkan pelayanan, sikap mengambil risiko saja tidak akan membawa daya saing yang terlekat secara mendalam. Pekerjaan para manajer profesional yang berdedikasi dalam mengurangi biaya produksi bahkan dalam jumlah yang kecil sekalipun dan pengurangan waktu pengiriman akan menentukan masa depan negara di samping juga bisnis individual.

3. Faktor Eksternal: Peristiwa Peluang

Peristiwa peluang merupakan perubahan yang tidak dapat diperkirakan di dalam lingkungan, sering kali tidak berkaitan dengan sistem bisnis internasional. Peristiwa ini mencakup terobosan yang tidak diharapkan dalam bidang teknologi atau produk baru, fluktuasi yang tajam dalam pasar modal dunia atau tingkat kurs asing, perubahan dalam kebijakan

pemerintah asing, gerakan dalam permintaan internasional, dan pecahnya perang.

2.1.4 Konsep Daya Saing Daerah

Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya (Abdullah, 2002).

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”.
2. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.

3. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
4. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional” (Abdullah, 2002).

2.1.5 Indikator Utama Daya Saing Daerah

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ira Irawati, 2008 dengan judul Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, variabel penentu daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia.

Masing-masing indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b) Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c) Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d) Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan variabel dimana seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Variabel ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b) Modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c) Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

Sumber Daya Manusia

Variabel sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b) Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c) Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d) Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

2.1.6 Indikator Penentu Daya Saing Daerah

Variabel daya saing daerah kota di Jawa Tengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perekonomian Daerah, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,

serta Sumber Daya Manusia. Masing-masing variabel berisi indikator-indikator penentu daya saing.

Indikator Perekonomian Daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto, Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, Tabungan, Laju Pertumbuhan Tabungan, Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri, Laju Pertumbuhan Sektor Jasa, Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian, Pendapatan asli Daerah, dan Realisasi Pajak Daerah.

Sedangkan indikator Infrastruktur dan Sumber Daya Alam adalah Ketersediaan Sumber Daya Lahan, Hasil Sumber Daya Air, Kualitas Jalan Raya, Jumlah Pelanggan Listrik, dan Persentase Rumah Tangga Terhadap Kepemilikan Pesawat Telepon.

Untuk variabel Sumber Daya Manusia indikatornya antara lain Angka Ketergantungan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Usia Produktif Terhadap Total Penduduk, Rasio Siswa Terhadap Sekolah, dan Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa. Jumlah dan deskripsi indikator daya saing menurut variabel utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah dan Deskripsi Indikator Daya Saing Menurut Variabel Utama

Variabel Utama	Jumlah Indikator	Deskripsi
I. Perekonomian Daerah	10 indikator	Merupakan ukuran kinerja secara umum perekonomian daerah secara makro.
II. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	5 indikator	Mengukur seberapa besar sumber daya: modal fisik, letak geografis, sumber daya alam, mendukung aktivitas perekonomian daerah.
III. Sumber Daya Manusia	5 indikator	Mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

2.1.7 Definisi dan Konsep Perkembangan Kota

Menurut Marbun (1992), kota merupakan kawasan hunian dengan jumlah penduduk relatif besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan tempat pelayanan umum. Kegiatan ekonomi merupakan hal yang penting bagi suatu kota karena merupakan dasar agar kota dapat bertahan dan berkembang (Jayadinata, 1992). Kedudukan aktifitas ekonomi sangat penting sehingga seringkali menjadi basis perkembangan sebuah kota. Adanya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan menjadi potensi perkembangan kawasan tersebut pada masa berikutnya.

Istilah perkembangan kota (*urban development*) dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam

masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik (Hendarto, 2005).

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat pematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer kesekunder atau tersier. Secara umum kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan (Hendarto, 2005).

Pada umumnya terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu:

- a. Faktor penduduk, yaitu adanya penambahan penduduk baik disebabkan karena pertumbuhan alami maupun karena migrasi.
- b. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat.
- c. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi.

Perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi (Firman, 1996). Kegiatan sekunder

dan tersier seperti manufaktur dan jasa-jasa cenderung untuk berlokasi di kota-kota karena faktor “*urbanization economics*” yang diartikan sebagai kekuatan yang mendorong kegiatan usaha untuk berlokasi di kota sebagai pusat pasar, tenaga kerja ahli, dan sebagainya.

Perkembangan kota menurut Raharjo dalam Widyaningsih (2001), bermakna perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota tersebut, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang yang sedikit menjadi teraglomerasi secara luas, dan seterusnya.

Dikatakan oleh Beatley dan Manning (1997) bahwa penyebab perkembangan suatu kota tidak disebabkan oleh satu hal saja melainkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan seperti hubungan antara kekuatan politik dan pasar, kebutuhan politik, serta faktor-faktor sosial budaya.

Teori Central Place dan *Urban Base* merupakan teori mengenai perkembangan kota yang paling populer dalam menjelaskan perkembangan kota-kota. Menurut teori *central place* seperti yang dikemukakan oleh Christaller (Daldjoeni, 1992), suatu kota berkembang sebagai akibat dari fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa untuk daerah sekitarnya. Teori *Urban Base* juga menganggap bahwa perkembangan kota ditimbulkan dari fungsinya dalam menyediakan barang kepada daerah sekitarnya juga seluruh daerah di luar batas-batas kota tersebut. Menurut teori ini, perkembangan ekspor akan secara langsung mengembangkan pendapatan kota. Disamping itu, hal tersebut akan

menimbulkan pula perkembangan industri-industri yang menyediakan bahan mentah dan jasa-jasa untuk industri-industri yang memproduksi barang ekspor yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan pendapatan kota lebih lanjut (Hendarto, 2005).

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai daya saing daerah telah dipublikasikan di berbagai jurnal ekonomi dan kajian ilmiah. Penelitian pertama dilakukan oleh Ira Irawati (2008) yang berfokus pada pengukuran tingkat daya saing daerah berdasarkan variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peringkat daya saing kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Variable yang digunakan adalah perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, turut mendukung kabupaten/kota tersebut untuk menjadi peringkat terbaik secara umum.

Penelitian kedua dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK BI) dan FE Unpad (2001) tentang identifikasi faktor-faktor penentu serta pemeringkatan daya saing antar daerah provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membantu daerah-daerah di

Indonesia dalam mengidentifikasi potensi dan prospek ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai ukuran daya saing. Selain itu juga untuk menetapkan peringkat daya saing antardaerah di Indonesia yang pada tahap selanjutnya diharapkan dapat menjadi rujukan masing-masing daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangan lebih luas yang dimilikinya dalam era otonomi daerah. Variable yang digunakan antara lain perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, governance dan kebijakan pemerintah, serta manajemen dan ekonomi mikro. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis daya saing dengan menghitung indeks. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati peringkat ke-1 daya saing nasional dengan enam indikator utama berada pada peringkat ke-1 nasional. Sedangkan Daerah Istimewa Aceh merupakan propinsi yang menempati peringkat terbawah dari segi daya saing daerah. Secara umum peringkat propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali berada di luar peringkat 10 besar nasional.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eko Budi Santoso (2010) yang berfokus pada strategi pengembangan perkotaan di wilayah Gerbangkertosusila berdasarkan pendekatan daya saing wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila, mengetahui keunggulan dan kelemahan daya saing daerah, mengetahui konsep pengembangan perkotaan Gerbangkertosusila, dan mengetahui strategi pengembangan daya saing perkotaan. Variabel yang digunakan antara lain sektor

basis, sumber daya alam, sumber daya manusia, perekonomian daerah, lingkungan usaha produktif, infrastruktur, perbankan dan lembaga keuangan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis *location quotient* (LQ) dan metode kualitatif dengan analisis SWOT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pengembangan perkotaan berdasarkan daya saing wilayah melihat dari sisi kemampuan keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Sumber daya manusia di perkotaan menjadi bagian dari keunggulan komparatif jika ditinjau dari sisi jumlah penduduk dan tenaga kerja, dan dapat menjadi bagian dari keunggulan kompetitif jika ditinjau dari sisi kualitas sumber daya manusia, seperti penduduk yang menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi. Untuk mengembangkan daya saing wilayah, diawali dengan penentuan spesialisasi wilayah yang didasarkan keunggulan komparatif. Selanjutnya dilakukan pemetaan daya saing wilayah sebagai masukan dalam menentukan keunggulan kompetitif. Produktivitas merupakan sumber daya saing perkotaan, sehingga kota yang berdaya saing adalah kota yang produktif.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode & Alat Analisis	Kesimpulan
1	Ira Irawati, 2008. Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, serta Variable Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Mengetahui peringkat daya saing kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.	Perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alat analisis Analytical Hierarchy Process (AHP)	Peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, turut mendukung kabupaten/kota tersebut untuk menjadi peringkat terbaik secara umum.
2.	Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK BI) dan FE Unpad, 2001. Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Serta Pemingkatan Daya Saing Antar Daerah Propinsi di Indonesia	Membantu daerah-daerah di Indonesia dalam mengidentifikasi potensi dan prospek ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai ukuran daya saing. Selain itu juga untuk menetapkan peringkat daya saing antardaerah di Indonesia yang pada tahap selanjutnya diharapkan dapat menjadi rujukan masing-masing daerah	Perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, governance dan kebijakan pemerintah, serta manajemen dan	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis daya saing.	DKI Jakarta menempati peringkat ke-1 daya saing nasional dengan enam indikator utama berada pada peringkat ke-1 nasional. Sedangkan Daerah Istimewa Aceh merupakan propinsi yang menempati peringkat terbawah dari segi daya saing daerah. Secara umum peringkat propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali

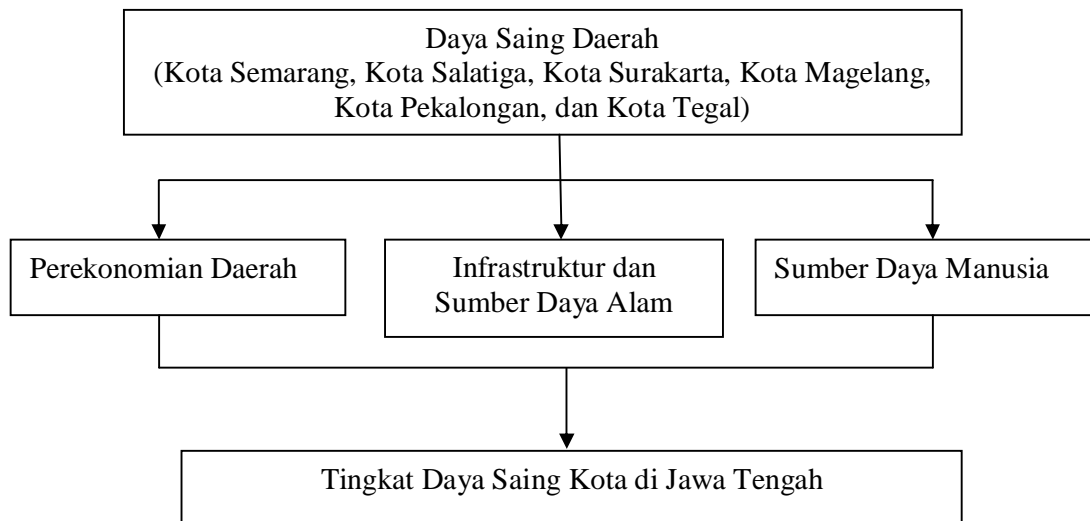
		dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangan lebih luas yang dimilikinya dalam era otonomi daerah.	ekonomi mikro.		berada di luar peringkat 10 besar nasional.
3.	Eko Budi Santoso, 2010. Strategi Pengembangan Perkotaan di Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Pendekatan Daya Saing Wilayah	Mengetahui kemampuan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila, mengetahui keunggulan dan kelemahan daya saing daerah, mengetahui konsep pengembangan perkotaan Gerbangkertosusila, dan mengetahui strategi pengembangan daya saing perkotaan.	Sektor basis, sumber daya alam, sumber daya manusia, perekonomian daerah, lingkungan usaha produktif, infrastruktur, perbankan dan lembaga keuangan.	Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis <i>location quotient</i> (LQ) dan metode kualitatif dengan analisis SWOT.	Strategi pengembangan perkotaan berdasarkan daya saing wilayah melihat dari sisi kemampuan keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Sumber daya manusia di perkotaan menjadi bagian dari keunggulan komparatif jika ditinjau dari sisi jumlah penduduk dan tenaga kerja, dan dapat menjadi bagian dari keunggulan kompetitif jika ditinjau dari sisi kualitas sumber daya manusia, seperti penduduk yang menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi.

					<p>Untuk mengembangkan daya saing wilayah, diawali dengan penentuan spesialisasi wilayah yang didasarkan keunggulan komparatif. Selanjutnya dilakukan pemetaan daya saing wilayah sebagai masukan dalam menentukan keunggulan kompetitif. Produktivitas merupakan sumber daya saing perkotaan, sehingga kota yang berdaya saing adalah kota yang produktif.</p>
--	--	--	--	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menandai dimulainya sebuah babak baru dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah dan keleluasaan dalam menyusun daftar prioritas pembangunan, dimana hal tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Masing-masing daerah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerahnya agar dapat bersaing dengan daerah lain. Peningkatan daya saing daerah kota di Jawa Tengah yang akan diteliti adalah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal dengan menggunakan analisis daya saing.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah disusun maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah menduduki peringkat pertama daya saing daerah kota di Jawa Tengah.
2. Banyaknya potensi yang dimiliki sebuah kota menjadikan kota tersebut unggul pada tingkat daya saing daerah kota di Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah, 2002).

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Indikator pada Perekonomian Daerah antara lain :

X1 = Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Data PDRB yang digunakan adalah PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011 atas dasar harga konstan tahun 2000.

X2 = Laju Pertumbuhan PDRB

Menurut BPS (2012) Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDRB. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011 atas dasar harga konstan tahun 2000.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan PDRB adalah :

$$= \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t : PDRB tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB tahun sebelumnya

X3 = PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk di setiap wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah (BPS). Data yang digunakan adalah PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011 atas dasar harga konstan 2000.

Rumus untuk menghitung PDRB per kapita :

$$= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \%$$

X4 = Tabungan

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan jumlah tabungan yang dimaksud adalah total keseluruhan tabungan yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu. Data yang digunakan adalah data posisi tabungan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

X5 = Laju Pertumbuhan Tabungan

Laju pertumbuhan tabungan menggambarkan pertumbuhan tabungan yang dihimpun oleh bank di suatu daerah. Data yang digunakan adalah data posisi tabungan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan tabungan adalah :

Keterangan :

S_x : Jumlah tabungan tahun tertentu

S_{x-1} : Jumlah tabungan tahun sebelumnya

X6 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri

Laju pertumbuhan produktivitas sektor industri merupakan pertumbuhan kemampuan sektor industri di suatu daerah dalam menghasilkan output. Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (sektor industri) tahun 2009, 2010, dan 2011.

X7 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Jasa

Laju pertumbuhan produktivitas sektor jasa merupakan pertumbuhan kemampuan sektor jasa di suatu daerah dalam menghasilkan output. Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (sektor jasa) tahun 2009, 2010, dan 2011.

X8 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian

Laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian merupakan pertumbuhan kemampuan sektor pertanian di suatu daerah dalam menghasilkan output. Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (sektor pertanian) tahun 2009, 2010, dan 2011.

X9 = Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota se Jawa Tengah tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011.

X10 = Realisasi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Data yang digunakan adalah data realisasi pajak daerah menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

2. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan variabel seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah.

Indikator pada Infrastruktur dan Sumber Daya Alam antara lain :

Y1 = Ketersediaan Sumber Daya Lahan

Ketersediaan sumber daya lahan menggambarkan seberapa besar luas lahan di suatu daerah yang penggunaannya dibagi menjadi dua

yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah. Data yang digunakan adalah luas penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Y2 = Hasil Sumber Daya Air

Hasil sumber daya air merupakan seluruh potensi yang terdapat di dalam air, termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya. Sumber daya air dapat digambarkan dengan jumlah produksi dan nilai perikanan kolam menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Y3 = Kualitas Jalan Raya

Kualitas jalan raya dapat digambarkan dengan panjang jalan kabupaten/kota menurut kondisi jalan di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Y4 = Jumlah Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik menggambarkan seberapa banyak pelanggan di suatu daerah yang memakai fasilitas listrik. Data yang digunakan adalah data pelanggan penjualan tenaga listrik (desa dan kelurahan) menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Y5 = Persentase Rumah Tangga Terhadap Kepemilikan

Pesawat Telepon

Persentase rumah tangga terhadap kepemilikan telepon menggambarkan seberapa banyak rumah tangga di suatu daerah

yang menggunakan atau memiliki fasilitas pesawat telepon. Data yang digunakan adalah data persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan kepemilikan pesawat telepon di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

3. Sumber Daya Manusia

Variabel sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Indikator pada Sumber Daya Manusia antara lain :

- Ketenagakerjaan : angka ketergantungan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk.
- Pendidikan : rasio jumlah siswa terhadap sekolah dan rasio jumlah pengajar terhadap siswa.

X1 = Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menggambarkan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dibandingkan dengan penduduk yang bekerja. Data yang digunakan adalah data penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan adalah :

$$= \frac{\text{Penduduk yang tidak bekerja}}{\text{Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$$

X2 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri digunakan untuk melihat besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Data yang digunakan adalah data penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu di Jawa Tengah dan data penduduk Jawa Tengah menurut kabupaten/kota dan kelompok umur tahun 2009, 2010, dan 2011.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung TPAK adalah :

$$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100 \%$$

X3 = Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total

Penduduk

Persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk adalah perbandingan antara penduduk usia produktif dengan membandingkan jumlah total penduduk di suatu daerah. Data yang digunakan adalah data penduduk Jawa Tengah menurut kabupaten/kota dan kelompok umur (15-64) tahun 2009, 2010, dan 2011, serta data penduduk menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, 2010, dan 2011.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk adalah :

$$= \frac{\text{Penduduk usia produktif}}{\text{Total penduduk}} \times 100\%$$

X4 = Rasio Siswa Terhadap Sekolah

Rasio siswa terhadap sekolah menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa di suatu daerah dengan jumlah sekolah pada tahun ajaran tertentu. Data yang digunakan adalah data banyaknya sekolah, murid, dan guru (SD, SLTP, dan SLTA) tahun pelajaran 2009/2010, 2010/2011, dan 2011/2012.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio siswa terhadap sekolah adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah siswa}}{\text{Jumlah sekolah}}$$

X5 = Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa

Rasio jumlah pengajar terhadap siswa menggambarkan perbandingan antara jumlah pengajar di suatu daerah dengan jumlah murid/siswa pada tahun ajaran tertentu. Data yang digunakan adalah data banyaknya sekolah, murid, dan guru (SD, SLTP, dan SLTA) tahun pelajaran 2009/2010, 2010/2011, dan 2011/2012.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio jumlah pengajar terhadap siswa adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah guru}}{\text{Jumlah siswa}}$$

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan peran yang sangat penting dalam suatu penelitian. Fungsi dari data itu sendiri adalah sebagai masukan/input yang akan diolah menjadi informasi yang siap untuk dilakukan analisis, yang selanjutnya menjadi output. Kualitas dan kelengkapan data akan sangat berpengaruh pada hasil dan kemampuan terhadap proses penelitian yang dilakukan. Semakin valid dan lengkap data yang ada, maka semakin berkualitas pula output yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui suatu media (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. BPS Jawa Tengah : Data PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita, PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, luas penggunaan lahan, produksi dan nilai perikanan kolam, luas wilayah, panjang jalan, jumlah penduduk bekerja dan tidak bekerja, penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dan mencari pekerjaan, jumlah penduduk, jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, data tabungan, dan jumlah pelanggan pesawat telepon.
2. PT. PLN Distribusi Jawa Tengah : Data jumlah pelanggan penjualan tenaga listrik.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan literatur-literatur yang terkait.

3.4 Metode Analisis

Merujuk pada Abdullah (2002), alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Daya Saing dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan faktor-faktor utama yang membentuk daya saing antar kota di Jawa Tengah.
2. Menentukan variabel-variabel ataupun kriteria-kriteria yang membentuk masing-masing faktor penentu daya saing antar daerah.
3. Menghitung skoring daya saing kota.

Setiap variabel baik perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia memiliki indikator masing-masing. Berbagai komponen indikator yang mempunyai satuan yang berbeda, maka dilakukan standarisasi atau normalisasi data untuk tiap indikator. Menurut jurnal penelitian dari Akhmad Syakir Kurnia yang merujuk pada Antonio Afonso (2003) dan jurnal penelitian Ira Irawati (2008), normalisasi dilakukan dengan cara menghitung rata-ratanya,

dan setiap nilai indikator dibagi dengan nilai rata-ratanya tersebut. Sedangkan untuk indikator dengan orientasi kinerja yang terbalik (misalnya angka ketergantungan), normalisasinya dilakukan dengan membagi rata-ratanya tersebut dengan nilai indikator.

Cara normalisasi atau standarisasi tiap indikator :

- Indikator yang hubungannya positif (apabila nilai indikator tersebut semakin besar artinya semakin baik) maka rumusnya

$$\text{adalah: } \frac{\text{Nilai indikator}}{\text{Rata-rata indikator}} = \text{Nilai indikator yang}$$

sudah di standarisasi

Indikator yang mempunyai hubungan positif antara lain PDRB, laju pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita, tabungan, laju pertumbuhan tabungan, laju pertumbuhan produktivitas sektor industri, laju pertumbuhan produktivitas sektor jasa, laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian, pendapatan asli daerah, realisasi pajak daerah, ketersediaan sumber daya lahan, hasil sumber daya air, kualitas jalan raya, jumlah pelanggan listrik, persentase rumah tangga terhadap kepemilikan pesawat telepon, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk, dan rasio siswa terhadap sekolah).

- Indikator yang hubungannya negatif (apabila nilai indikator tersebut semakin besar artinya semakin buruk) maka rumusnya

$$\text{adalah: } \frac{\text{Rata-rata indikator}}{\text{Nilai indikator}} = \text{Nilai indikator yang}$$

sudah di standarisasi

Indikator yang mempunyai hubungan negatif adalah angka ketergantungan dan rasio jumlah pengajar terhadap siswa.

Setelah itu masing-masing indikator dalam satu daerah kota pada satu variabel dijumlah, dan hasilnya tersebut merupakan nilai total yang dapat menentukan peringkat daya saing.

- Perekonomian Daerah

Daerah Kota	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Jumlah
Kota Magelang	A	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Kota Surakarta	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
Kota Salatiga	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Kota Semarang	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
Kota Pekalongan	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
Kota Tegal	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
Rata-rata	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

Keterangan :

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X2 = Laju Pertumbuhan PDRB

X3 = PDRB per Kapita

X4 = Tabungan

X5 = Laju Pertumbuhan Tabungan

X6 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri

X7 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Jasa

X8 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian

X9 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X10= Realisasi Pajak Daerah

- Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Daerah Kota	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Jumlah
Kota Magelang	a	a	a	a	a	a
Kota Surakarta	b	b	b	b	b	b
Kota Salatiga	c	c	c	c	c	c
Kota Semarang	d	d	d	d	d	d
Kota Pekalongan	e	e	e	e	e	e
Kota Tegal	f	f	f	f	f	f
Rata-rata	Z	Z	Z	Z	Z	Z

Keterangan :

Y1 = Ketersediaan Sumber Daya Lahan

Y2 = Hasil Sumber Daya Air

Y3 = Kualitas Jalan Raya

Y4 = Jumlah Pelanggan Listrik

Y5 = Persentase Rumah Tangga Terhadap Kepemilikan
Pesawat Telepon

- Sumber Daya Manusia

Daerah Kota	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Jumlah
Kota Magelang	a	a	a	a	a	a	a
Kota Surakarta	b	b	b	b	b	b	b
Kota Salatiga	c	c	c	c	c	c	c
Kota Semarang	d	d	d	d	d	d	d
Kota Pekalongan	e	e	e	e	e	e	e
Kota Tegal	f	f	f	f	f	f	f
Rata-rata	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

Keterangan :

X1 = Angka Ketergantungan

X2 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

X3 = Persentase Penduduk Usia Produktif Terhadap Total

Penduduk

X4 = Rasio Siswa Terhadap Sekolah

X5 = Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa

4. Melakukan pemeringkatan (ranking) daerah kota secara keseluruhan dan menurut variabel utama berdasarkan hasil perhitungan scoring daya saing antar daerah. Semakin tinggi nilainya maka semakin unggul peringkat daya saingnya.
5. Membuat Neraca Daya Saing Daerah untuk setiap kota berdasarkan faktor-faktor yang merupakan advantage (indikator-indikator yang merupakan kekuatan daerah) dan disadvantage (indikator-indikator yang merupakan kelemahan daerah) setiap kota.
6. Menganalisis potensi masing-masing kota berdasarkan peringkat daya saing kota di Jawa Tengah.